



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 April 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SARTO
2. Jabatan : KETUA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI DOKTOR TEKNIK KIMIA (PAW)
3. NHK : 1012472

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.500.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/100 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **280.000.000**

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
2. MOBIL, SUZUKI XCROSSOVER Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BEJ A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **230.382.362**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **3.010.382.362**



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.010.382.362

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.